



Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data: *Systematic Literature Review*

Saffana Hammamiyah Nabilah¹, Abdal²

^{1,2} Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

nabilahsaffana@gmail.com¹, abdal@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk membangun tata kelola data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, implementasi SDI di instansi pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, interoperabilitas sistem, serta ego sektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, serta merumuskan strategi penguatan implementasi SDI. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada *Google Scholar* menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan rentang publikasi tahun 2020–2026. Dari 100 artikel awal, setelah melalui tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan kriteria inklusi, diperoleh 10 artikel yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI telah berkontribusi terhadap integrasi data, transparansi informasi publik, dan penguatan pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi belum berjalan optimal. Berdasarkan model George C. Edward III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi, dengan sumber daya dan komunikasi sebagai faktor dominan. Strategi penguatan SDI mencakup peningkatan kompetensi pengelola data, penyediaan infrastruktur digital, pengembangan interoperabilitas sistem, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar pemerintahan berbasis data dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SDI tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga kesiapan organisasi, komitmen pelaksana, serta kolaborasi berkelanjutan antaraktor pemerintah pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Satu Data Indonesia; Implementasi Kebijakan; Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data; George C. Edward III; *Systematic Literature Review*

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang lebih berbasis data. Kondisi tersebut menempatkan data sebagai elemen penting dalam mendukung pengelolaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan yang lebih akurat. Data tidak lagi hanya berfungsi sebagai keluaran administrasi pemerintahan, tetapi telah berkembang menjadi sumber daya strategis yang dimanfaatkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian berbagai kebijakan publik. (Kitchin, 2014) menjelaskan bahwa perkembangan era data telah mengubah cara organisasi publik memahami fenomena sosial dan menentukan tindakan melalui pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sistem pengelolaan data yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor pemerintahan.

Konsep tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*) mengacu pada pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan data sebagai dasar dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, implementasi program, hingga evaluasi kinerja pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, standar pengelolaan data, mekanisme koordinasi antarorganisasi, serta kapasitas sumber daya manusia (Yanto, Anirwan, Nugroho, & Irwan, 2026). (OECD, 2019) menjelaskan bahwa pemerintahan berbasis data membutuhkan penguatan tata kelola, kemampuan organisasi, dan kapasitas institusi agar data dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif.

Guna memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data, pemerintah menetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan data pemerintah yang lebih terintegrasi sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan lintas instansi. Dalam implementasinya, SDI mengacu pada empat prinsip utama, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, serta pemanfaatan kode

referensi dan data induk yang berfungsi sebagai fondasi integrasi data pada tingkat nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Kebijakan Satu Data Indonesia hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang sebelumnya muncul dalam tata kelola data pemerintahan. Beragam instansi masih menggunakan standar data yang berbeda, pertukaran data belum berlangsung secara efektif, dan koordinasi antar lembaga pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala. Islami (2021) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal karena terdapat tantangan pada proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak cukup ditopang oleh regulasi semata, melainkan juga memerlukan dukungan kapasitas organisasi, sumber daya, dan kesiapan institusi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Selain itu, penelitian Adinegoro dkk. (2024) menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia masih menghadapi persoalan terkait interoperabilitas, koordinasi antarinstansi, serta kebutuhan penguatan tata kelola data. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SDI merupakan proses kompleks yang membutuhkan perubahan pada aspek teknologi, kelembagaan, dan budaya organisasi pemerintahan.

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi proses penjeraman kebijakan ke dalam tindakan nyata. George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan dan dipahami secara tepat oleh para pelaksana. Sumber daya mengacu pada kecukupan tenaga pelaksana, dukungan finansial, infrastruktur, serta teknologi yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Selain itu, disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pengaturan kewenangan, prosedur operasional, dan mekanisme koordinasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Berdasarkan perspektif tersebut, implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi persoalan pembangunan sistem teknologi informasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan kelembagaan pemerintah. Penelitian Nuryana dan Junaidi (2025) mengenai implementasi Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antaraktor, serta kebutuhan penguatan mekanisme pengelolaan data. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan Satu Data Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai Satu Data Indonesia telah memberikan berbagai gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagian penelitian berfokus pada aspek regulasi dan tata kelola data, sementara penelitian lainnya mengkaji implementasi SDI pada tingkat pemerintah daerah tertentu. Namun, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan studi kasus sehingga memberikan gambaran yang terbatas pada lokasi atau instansi tertentu.

Kajian mengenai implementasi Satu Data Indonesia selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan studi kasus pada instansi atau daerah tertentu sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat parsial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi kebijakan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada konteks organisasi atau wilayah tertentu, penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis temuan dari berbagai studi terkait. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan perspektif George C. Edwards III sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola implementasi kebijakan pada berbagai konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui beberapa pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu? (2) Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan perspektif George C. Edward III? dan (3) Bagaimana strategi penguatan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* dengan menggunakan perspektif teori George C. Edward III. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan berbasis data serta memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data di Indonesia.

Tinjauan Literatur

1) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak

hanya dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan publik (Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022).

Menurut Dye (2017), kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian pilihan yang dibuat pemerintah terkait tindakan yang akan dilaksanakan maupun yang sengaja tidak dilakukan. Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan serta menentukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki hubungan erat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah karena setiap kebijakan akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kajian administrasi publik, implementasi dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Subianto (2020) menyatakan bahwa kualitas perumusan kebijakan saja tidak cukup untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Implementasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan rumusan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai. Melalui proses implementasi, berbagai keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif penelitian ini, Kebijakan Satu Data Indonesia dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Selain bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintah, kebijakan ini juga berfungsi sebagai sarana reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi data lintas instansi, serta pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan tersebut hadir sebagai upaya pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan data yang terpadu sehingga mampu mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2) Implementasi Kebijakan Publik

Hill dan Hupe (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata dalam lingkungan administrasi maupun masyarakat. Tahap ini memiliki peran penting karena menjadi penentu tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup proses interpretasi, koordinasi, dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi yang dihadapi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, implementasi melibatkan interaksi antara berbagai aktor, organisasi, dan institusi yang memiliki peran dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, efektivitas komunikasi, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan menjadi relevan dalam mengkaji Kebijakan Satu Data Indonesia karena kebijakan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, hingga pemerintah daerah. Kebutuhan akan koordinasi lintas instansi dan integrasi data yang berkelanjutan menjadikan implementasi sebagai aspek yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Berbagai model implementasi telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Salah satu model yang banyak digunakan dalam studi administrasi publik adalah model implementasi George C. Edwards III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

4) Komunikasi (*Communication*)

George C. Edwards (1980) menjelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Kebijakan dapat berjalan efektif apabila tujuan, prosedur, dan standar pelaksanaan dapat dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat. Dalam konteks Satu Data Indonesia, komunikasi menjadi faktor penting karena kebijakan ini melibatkan banyak organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan berbeda. Ketidakefektifan antarinstansi mengenai standar data maupun mekanisme berbagi data dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

5) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta teknologi. George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif apabila organisasi pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai. Pada implementasi Satu Data Indonesia, sumber daya menjadi aspek penting karena pengelolaan data membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan teknis, infrastruktur digital, serta dukungan kelembagaan.

6) Disposisi (*Disposition*)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, serta tingkat kesediaan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Faktor ini menjadi penting karena efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan prosedur, tetapi juga oleh dukungan serta penerimaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Semakin tinggi komitmen pelaksana, semakin besar peluang kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Satu Data Indonesia, disposisi tercermin dari kesungguhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung integrasi data, meningkatkan kolaborasi antarinstansi, serta menerapkan prinsip berbagi data sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Satu Data Indonesia.

7) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur kerja, pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi dalam organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan proses implementasi menjadi lambat. Dalam konteks SDI, struktur birokrasi menjadi faktor penting karena kebijakan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor antara produsen data, walidata, dan pembina data.

8) Kebijakan Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membangun tata kelola data pemerintah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Standar data;
2. Metadata;
3. Interoperabilitas data;
4. Penggunaan kode referensi dan data induk.

Prinsip tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data pemerintah yang sebelumnya masih mengalami fragmentasi, perbedaan standar, serta keterbatasan pertukaran data antarinstansi. Satu Data Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembangunan sistem teknologi informasi, tetapi juga mencakup aspek tata kelola kelembagaan. Implementasi kebijakan ini membutuhkan koordinasi antaraktor pemerintah agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Dalam penyelenggaraannya, Satu Data Indonesia melibatkan beberapa aktor utama, yaitu pembina data, walidata, dan produsen data. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDI membutuhkan koordinasi lintas organisasi agar proses penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dapat berjalan secara efektif.

9) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*) merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menempatkan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam pendekatan ini, data digunakan untuk memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas kebijakan, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta melakukan evaluasi terhadap program pemerintah (OECD, 2019). Kitchin (2014) menjelaskan bahwa perkembangan era data telah mengubah cara organisasi memahami dan mengelola berbagai persoalan melalui pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sektor publik, pemanfaatan data memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Selain itu, OECD (2019) menjelaskan bahwa pemerintahan berbasis data membutuhkan dukungan kelembagaan, kapasitas organisasi, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menggunakan data secara strategis. Dalam administrasi publik, pemanfaatan data juga berkaitan dengan konsep *evidence-based policy making*, yaitu pendekatan pengambilan keputusan yang menggunakan bukti empiris sebagai dasar dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif perlu didukung oleh informasi dan data yang valid agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki hubungan erat dengan konsep tata kelola pemerintahan berbasis data karena kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Melalui implementasi SDI, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, serta berbagai temuan yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish (PoP) dengan sumber data berasal dari Google Scholar. Penelusuran artikel dilakukan pada rentang publikasi tahun 2020–2026 menggunakan kata

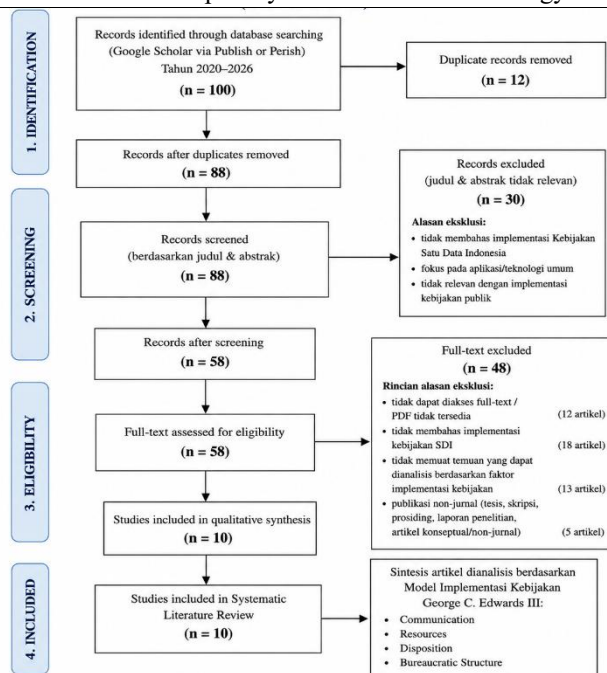
kunci "Satu Data Indonesia", "Implementasi Satu Data Indonesia", "Implementasi Kebijakan" AND "Satu Data Indonesia", "Tata Kelola Data Pemerintah", serta "Data Governance" AND "Government". Pemilihan rentang tahun tersebut bertujuan untuk memperoleh penelitian yang relevan dengan perkembangan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Seleksi artikel dilakukan menggunakan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang meliputi tahap *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Hasil pencarian awal memperoleh 100 artikel. Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat, diperoleh 88 artikel untuk tahap *screening*. Pada tahap ini dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga sebanyak 30 artikel dieliminasi karena tidak relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, 58 artikel memasuki tahap *eligibility* dan ditelaah secara menyeluruh (*full-text assessment*). Pada tahap ini sebanyak 48 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi, seperti tidak membahas implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, tidak memiliki temuan yang relevan dengan fokus penelitian, tidak tersedia dalam bentuk *full text*, atau merupakan publikasi non-jurnal. Dengan demikian, diperoleh 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam proses sintesis literatur. Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian disajikan pada Tabel 1, sedangkan alur proses seleksi artikel berdasarkan metode PRISMA ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 1. Kriteria Seleksi Artikel

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis publikasi	Artikel Jurnal Ilmiah	Buku, prosiding, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, berita, opini, dan artikel non-jurnal
Rentang tahun	2020-2026	Artikel terbit sebelum tahun 2020
Bahasa	Bahasa Indonesia dan atau Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Topik Penelitian	Membahas implementasi Satu Data Indonesia (SDI), tata kelola data pemerintah, kebijakan data pemerintah, atau implementasi kebijakan terkait SDI	Penelitian yang hanya membahas aspek teknis/teknologi informasi tanpa membahas implementasi kebijakan atau tata kelola pemerintahan
Ketersediaan artikel	Artikel tersedia secara lengkap (<i>full text</i>) dan dapat diakses	Artikel tanpa akses <i>full text</i> atau dokumen tidak lengkap
Relevansi	Memuat temuan mengenai faktor pendukung, hambatan, tantangan, strategi, atau keberhasilan implementasi kebijakan SDI yang dapat dianalisis menggunakan perspektif implementasi kebijakan	Tidak berkaitan dengan implementasi SDI atau tidak memuat temuan yang relevan dengan fokus penelitian

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026)



Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Prisma
 Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Data yang diperoleh dari 10 artikel terpilih dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengodekan, dan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, serta merumuskan implikasi dan rekomendasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan proses seleksi literatur yang telah dilakukan, diperoleh 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Artikel-artikel tersebut berasal dari publikasi tahun 2021–2026. Karakteristik masing-masing artikel yang dianalisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Artikel yang Dianalisis

No	Judul	Penulis & Tahun terbit	Tujuan Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	Mewujudkan Satu Data Indonesia 2.0 Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Secara Kolaboratif dalam Rangka Menghadapi Global Megatrends 2030	Ali Purba, Alif Nurrachman & Rangga Pijar Adhyaksa (2021)	Menganalisis kelemahan implementasi SDI saat ini dan merumuskan model SDI 2.0 berbasis collaborative governance untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas data.	Implementasi SDI dinilai belum optimal karena kolaborasi masih terbatas pada instansi pemerintah, kepemimpinan fasilitatif belum efektif, dan keterlibatan aktor non-pemerintah masih minim. Penulis menawarkan konsep SDI 2.0 yang melibatkan pemerintah, universitas, sektor swasta, dan NGO dalam satu platform data kolaboratif untuk mendukung evidence-based policy dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
2.	Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan <i>Critical Success Factors</i> (CSFs)	Maulia Jayantina Islami (2021)	Mengidentifikasi tantangan atau permasalahan dan merumuskan faktor-faktor	Tantangan implementasi SDI meliputi data yang tidak terstandar, lemahnya koordinasi antarinstansi, ego sektoral, interoperabilitas data, serta isu

				yang menentukan keberhasilan (Critical Success Factors) dalam implementasi OGD dalam konteks SDI.	privasi data. Faktor keberhasilan SDI mencakup kualitas data, dukungan kebijakan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan komitmen pimpinan.
3.	Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Ciamis)	Wildan Prasetiya, Andri Otong Taufiq, Garvera Syam (2022)	Sany Asep Fauzi, Husni Rindu Fachmy Arifin	Mengidentifikasi permasalahan implementasi SDI di pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Ciamis.	Kekuatan utama implementasi SDI terletak pada regulasi dan teknologi. Kelemahannya meliputi keterbatasan SDM, aturan turunan, pendanaan, dan ego sektoral. Peluang berasal dari kebutuhan data berkualitas, sedangkan ancamannya adalah perubahan regulasi dan keamanan siber.
4.	Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan	Sena Prabujaya, Januar Aryansah, Muhammad Firdaus Febriansyah (2023)	Putra Eko &	Mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Open Government Data (OGD).	Implementasi kebijakan belum berjalan maksimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan SDM teknis, fasilitas teknologi yang belum memadai, belum optimalnya SOP, dan koordinasi yang kurang efektif. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang jelas, kewenangan, informasi yang tersedia, disposisi pelaksana, dan insentif. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, fasilitas, komunikasi, dan koordinasi antarinstansi.
5.	Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik	Eli Saepudin, Nurul Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah (2025)	Apud Firllyn Aida	Mengidentifikasi tantangan dan faktor keberhasilan implementasi SDI dalam mendukung transparansi dan akses data publik.	SDI berperan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses data publik melalui standarisasi data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Tantangan utama meliputi integrasi data, kompetensi SDM, dan ego sektoral antarinstansi.
6.	Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia	Luluk Setiyawan, Yusrina, Sindy Atul Mubarakah, & Asropi (2025)	Sapto	Menganalisis implementasi SDI menggunakan perspektif Collaborative Governance Ansell dan Gash.	Implementasi SDI belum optimal karena ketidakseimbangan peran dan pengaruh antaraktor, keterbatasan kepemimpinan fasilitatif, serta minimnya keterlibatan sektor non-pemerintah. Diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi dengan sektor swasta serta perguruan tinggi.
7.	Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Muhammad Rasyid Ridho & Riyan Jaelani (2025)		Menganalisis collaborative governance dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia untuk penyediaan informasi publik di	Implementasi SDI telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya SDM pengelola data, data yang belum mutakhir, serta lemahnya kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Desain

			Kabupaten Progo.	Kulon	institusional menjadi aspek yang paling berhasil.
8.	Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten	Syarrah Irawan & Riny Handayani (2025)	Mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten.		Implementasi SDI di Provinsi Banten belum optimal. Kendala utama adalah keterbatasan SDM, belum adanya jabatan fungsional statistisi, fasilitas yang belum memadai, belum tersusunnya SOP SDI, serta belum adanya sanksi bagi produsen data yang tidak memenuhi ketentuan.
9.	Pengelolaan Penerapan Satu Data Indonesia Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	Yudi Agusta & I Made Agus Wirahadi Putra (2025)	Menstandarkan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Badung dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan data.		Implementasi SDI diperkuat melalui penyusunan SOP, standarisasi sistem, penetapan daftar data, dan pelatihan SDM. Keberhasilan SDI memerlukan kelengkapan data, standar pengelolaan, dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
10.	Indonesia's One Data Policy: Challenges and Opportunities Public Decision Making	Juwita Pratiwi Lukman & Anna Fiulaizi (2026)	Menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangannya dalam mendukung pengambilan keputusan publik berbasis bukti.		Implementasi SDI menunjukkan kemajuan pada aspek regulasi dan kelembagaan di tingkat pusat, namun belum merata di daerah karena keterbatasan infrastruktur digital, kualitas data, dan SDM. SDI berpotensi meningkatkan integrasi data, efisiensi birokrasi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026)

Sintesis Temuan Implementasi Satu Data Indonesia Berdasarkan Model George Edward III

Tabel 3. Sintesis Temuan Implementasi Satu Data Indonesia Berdasarkan Model George C. Edward III

Dimensi Edward III	Temuan Utama	Artikel Pendukung
Komunikasi	Koordinasi antarinstansi belum optimal, masih terdapat ego sektoral dan hambatan pertukaran data	Islami (2021); Prabujaya dkk. (2023); Prasetya dkk. (2022); Saepudin dkk. (2025); Ridho & Jaelani (2025)
Sumber Daya	Keterbatasan SDM, kompetensi pengelola data, infrastruktur digital, dan pendanaan	Prabujaya dkk. (2023); Prasetya dkk. (2022); Irawan & Handayani (2025); Agusta & Putra (2025); Lukman & Fiulaizi (2026)
Disposisi	Komitmen pimpinan, kemauan berbagi data, dan dukungan pelaksana berpengaruh terhadap implementasi	Islami (2021); Purba dkk. (2021); Prabujaya dkk. (2023); Ridho & Jaelani (2025)
Struktur Birokrasi	SOP, regulasi, dan koordinasi kelembagaan masih memerlukan penguatan	Purba dkk. (2021); Prabujaya dkk. (2023); Irawan & Handayani (2025); Setiyawan dkk. (2025); Agusta & Putra (2025)

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026)

Berdasarkan sintesis terhadap 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dipengaruhi oleh empat dimensi utama dalam model implementasi kebijakan George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi sumber daya dan komunikasi merupakan aspek yang paling dominan dibahas dalam literatur, terutama terkait keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur digital, koordinasi antarinstansi, dan masih kuatnya ego sektoral. Sementara itu, dimensi disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan pentingnya komitmen pelaksana, kepemimpinan, serta keberadaan SOP dan mekanisme koordinasi kelembagaan dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Berdasarkan Model George C. Edward III

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa dimensi komunikasi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Permasalahan yang paling sering ditemukan adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, hambatan pertukaran data, serta masih kuatnya ego sektoral dalam pengelolaan data.

Penelitian Islami (2021) mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan masih adanya ego sektoral menyebabkan proses integrasi data belum berjalan optimal. Temuan serupa juga ditemukan oleh Prabujaya dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa transmisi komunikasi antar pelaksana kebijakan belum berjalan secara efektif sehingga menghambat implementasi SDI. Selain itu, penelitian Prasetya dkk. (2022) dan Saepudin dkk. (2025) menunjukkan bahwa koordinasi dan integrasi data antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena masing-masing instansi cenderung mempertahankan sistem dan data yang dimiliki. Temuan tersebut diperkuat oleh Ridho dan Jaelani (2025) yang menyatakan bahwa proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi SDI masih belum optimal.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDI tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antar aktor yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi serta peningkatan kolaborasi lintas sektor guna mengurangi ego sektoral dan memperkuat pertukaran data antarinstansi.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dimensi sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, pendanaan, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola data.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama implementasi SDI. Prabujaya dkk. (2023) menemukan bahwa kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Prasetya dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan pendanaan menjadi kelemahan utama implementasi SDI di tingkat daerah. Penelitian Irawan dan Handayani (2025) juga mengidentifikasi belum tersedianya jabatan fungsional statistisi serta keterbatasan fasilitas pendukung sebagai hambatan implementasi kebijakan.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi tantangan yang sering ditemukan dalam literatur. Lukman dan Fiulaizi (2026) menjelaskan bahwa implementasi SDI di daerah masih menghadapi kesenjangan infrastruktur teknologi, kualitas data, dan kapasitas aparatur. Sementara itu, Agusta dan Putra (2025) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan standarisasi pengelolaan data secara berkelanjutan.

Hasil sintesis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDI sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Solusinya adalah melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas infrastruktur digital, dan dukungan anggaran yang memadai menjadi kebutuhan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Disposisi

Hasil kajian menunjukkan bahwa disposisi merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Dimensi ini berkaitan dengan tingkat komitmen, dukungan, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun tidak seluruh artikel membahas aspek disposisi secara eksplisit, temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SDI sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan komitmen dari instansi pelaksana. Kondisi tersebut menjadi penting mengingat penerapan SDI menuntut perubahan pola kerja, peningkatan kolaborasi, serta kesediaan berbagai instansi untuk berbagi dan mengintegrasikan data secara berkelanjutan.

Islami (2021) mengidentifikasi bahwa dukungan pimpinan, komitmen organisasi, dan kepercayaan terhadap kualitas data merupakan faktor keberhasilan yang sangat menentukan implementasi SDI. Selanjutnya, Purba dkk. (2021) menekankan pentingnya kepemimpinan fasilitatif dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam implementasi

SDI masih belum optimal. Penelitian Prabujaya dkk. (2023) menemukan bahwa adanya insentif bagi pelaksana menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Sementara itu, Ridho dan Jaelani (2025) menunjukkan bahwa lemahnya kepemimpinan fasilitatif menyebabkan proses kolaborasi belum berjalan secara maksimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDI tidak hanya membutuhkan sumber daya dan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan. Semakin tinggi tingkat dukungan pimpinan dan kemauan berbagi data antarinstansi, semakin besar peluang keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, prosedur operasional, pembagian kewenangan, serta koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi masih menjadi tantangan penting dalam implementasi SDI.

Prabujaya dkk. (2023) dan Irawan dan Handayani (2025) menemukan bahwa belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) secara komprehensif menjadi salah satu hambatan implementasi SDI. Selain itu, Irawan dan Handayani (2025) juga menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak memenuhi ketentuan menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

Purba dkk. (2021) dan Setiyawan dkk. (2025) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi antar aktor dalam mendukung implementasi SDI. Meskipun regulasi terkait SDI telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala karena koordinasi antar lembaga belum berjalan secara efektif. Sementara itu, Agusta dan Putra (2025) menunjukkan bahwa penyusunan SOP dan standarisasi pengelolaan data merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDI.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi menjadi prasyarat penting dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia. Penguatan SOP, kejelasan pembagian peran antar lembaga, serta peningkatan koordinasi kelembagaan diperlukan untuk memastikan integrasi data dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Berdasarkan sintesis terhadap 10 yang dianalisis, implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pemerintah dalam mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data secara efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi sumber daya dan komunikasi merupakan aspek yang paling banyak ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai implementasi Satu Data Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama implementasi SDI tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada kapasitas organisasi pemerintah dalam mengelola dan mengintegrasikan data. Meskipun regulasi SDI telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDI membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan sistem teknologi informasi, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan secara kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Purba dkk. (2021), Setiyawan dkk. (2025), serta Ridho dan Jaelani (2025) yang menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antaraktor dalam mendukung integrasi data pemerintah. Selain itu, konsep *data-driven governance* menegaskan bahwa pemanfaatan data yang efektif memerlukan dukungan kapasitas kelembagaan, kualitas data, serta mekanisme koordinasi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, strategi penguatan implementasi SDI dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola data, sebagaimana direkomendasikan oleh Agusta dan Putra (2025), Irawan dan Handayani (2025), serta Lukman dan Fiulaizi (2026). Selain itu, pengembangan interoperabilitas sistem data dan penguatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan integrasi data yang diidentifikasi oleh Islami (2021), Saepudin dkk. (2025), serta Ridho dan Jaelani (2025). Penguatan tata kelola data juga perlu didukung melalui penyusunan SOP yang lebih komprehensif, kejelasan pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang memadai guna menjamin konsistensi implementasi kebijakan.

Implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai program integrasi data pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan implementasi SDI pada akhirnya akan menentukan sejauh mana data dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, sumber literatur yang dianalisis hanya berasal dari database Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2020–2026, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya penelitian relevan yang tidak teridentifikasi

dalam proses penelusuran. Kedua, penggunaan metode *Systematic Literature Review* menyebabkan temuan penelitian sangat bergantung pada kualitas, kelengkapan, dan relevansi artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pencarian literatur melalui berbagai database ilmiah lainnya serta mengombinasikan pendekatan kajian literatur dengan penelitian empiris agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia pada berbagai konteks pemerintahan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data melalui pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap 10 artikel terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI telah mendukung upaya integrasi dan pemanfaatan data pemerintah, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dari hasil sintesis literatur, dimensi sumber daya dan komunikasi menjadi faktor yang paling dominan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, interoperabilitas sistem, dan koordinasi antarinstansi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDI tidak hanya bergantung pada pembangunan sistem teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola data, peningkatan interoperabilitas sistem informasi, serta penguatan mekanisme koordinasi menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data. Selain memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik berbasis data, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan data hasil implementasi SDI terhadap kualitas pengambilan keputusan publik, kinerja pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data.

Reference

- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan*, 16(1). Doi: <https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V16i01.21869>
- Agusta, Y., & Putra, I. M. (2025). Pengelolaan Penerapan Satu Data Indonesia Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung. *WIDYABHAKTI JURNAL ILMIAH POPULER*, 8(1), 73-78. Doi: <https://doi.org/10.30864/Widyabhakti.V8i1.881>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- George C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: DC: Congressional Quarterly Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction To The Study Of Operational Governance*. SAGE.
- Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Di Pemerintah Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 8(1). Doi: <https://doi.org/10.61332/Ijpa.V8i1.225>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan Dan Critical Success Factors. *JURNAL KOMUNIKA: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13-23. Doi: <http://doi.org/10.31504/Komunika.V9i1.3750>
- Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures And Their Consequences*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Lukman, J. P., & Fiulaizi, A. (2026). Indonesia's One Data Policy: Challenges And Opportunities Public Decision Making. *Jurnal Pubbis: (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis)*, 10(1), 95-108. Doi: [10.35722/Jurnalpubbis.V10i1.1556](https://doi.org/10.35722/Jurnalpubbis.V10i1.1556)
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356-383. Doi: <https://doi.org/10.36982/Jpp.V10i2.5266>
- OECD. (2019). *The Path To Becoming A Data-Driven Public Sector*. Paris: OECD Publishing. Doi: <https://doi.org/10.1787/059814a7-En>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*. Retrieved From Peraturan.Bpk.Go.Id: <https://peraturan.bpk.go.id/details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Prabujaya, S. P., Aryansah, J. E., & Febriansyah, M. F. (2023). Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Mewujudkan Open Government Data Di Provinsi Sumatera Selatan. *Pesirah Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 18-33. Doi: [10.47753/Pjap.V4i2.72](https://doi.org/10.47753/Pjap.V4i2.72)
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, F. S. (2022). TANTANGAN IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS KABUPATEN CIAMIS) . *Ilmu Pemerintahan*.
- Purba, A. P., Nurrachman, A., & Adhyaksa, R. P. (2021). MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA 2.0 MELALUI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SECARA KOLABORATIF DALAM RANGKA MENGHADAPI GLOBAL MEGATRENDS 2030. *Ilmu Administrasi*.
- Ridho, M. R., & Jaelani, R. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(10).
- Saepudin, E. A., Solehatunnisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A., & Fadillah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia Dalam Mendukung. *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442-452. Doi: <https://doi.org/10.63822/Pydk5v51>
- Setiyawan, L. S., Yusrina, Mubarakah, S. A., & Asropi. (2025). Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 11(1), 81-92. Retrieved from <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>
- Suaib, H., Rakia, A. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Makassar: Humanities Genius.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Yanto, E., Anirwan, Nugroho, T. C., & Irwan. (2026). Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 6(2), 109-204. doi:<https://doi.org/10.51577/ijpublication.v6i2.949>